Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30236-30242

Strategi Politik Wali Kota Palembang Dalam Mewajibkan Penggunaan Angkutan Umum Bagi Aparatur Sipil Negara

Rizki Putra Wijaya[1], Kun Budianto[2], Hatta Azzuhri[3]
[123]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding Author: Rizki Putra Wijaya, e-mail: rizkiputraw1@gmail.com

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi politik Wali Kota Palembang dalam mewajibkan penggunaan angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 46 Tahun 2025. Kebijakan ini dibuat sebagai upaya pemerintah kota dalam mengurangi kemacetan, mendorong penggunaan transportasi umum, serta membentuk perubahan perilaku birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terbentuknya strategi politik Wali Kota Palembang serta pelaksanaannya dilingkungan pemerintah kota dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak Pemerintah Kota Palembang, Sekretariat Daerah Kota Palembang, Dinas Perhubungan dan Pendidikan, Masyarakat serta ASN dilingkungan pemerintah kota palembang sebagai sasaran kebijakan dan titik transportasi umum. Analisis data menggunakan teori strategi politik Geoff Mulgan yang meliputi tujuan *purposes*, lingkungan *environment*, arah kebijakan *direction*, dan tindakan *action*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk strategi politik non-elektoral Wali Kota Palembang dalam mendorong perubahan perilaku ASN agar menggunakan angkutan umum sebagai contoh bagi masyarakat. Pelaksanaannya sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana transportasi umum dan belum optimalnya kepatuhan ASN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sebagai solusi transportasi, tetapi juga sebagai strategi politik kepala daerah dalam membangun legitimasi kepemimpinan kepemimpinan daerah.

Kata Kunci: Strategi Politik, ASN, Kebijakan Publik, Transportasi Umum

ABSTRACT

This study examines the Mayor of Palembang's political strategy in mandating the use of public transportation for State Civil Apparatus (ASN) through the Mayor of Palembang's Circular Letter Number 46 of 2025. This policy was created as an effort by the city government to reduce congestion, encourage the use of public transportation, and shape bureaucratic behavior change within the Palembang City Government. This study aims to determine the process of the Mayor of Palembang's political strategy formation and its implementation within the city government within this policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with representatives from the Palembang City Government, the Palembang City Regional Secretariat, the Department of Transportation and Education, the community, and ASN within the Palembang City Government as the policy targets and public transportation points. Data analysis uses Geoff Mulgan's political strategy theory, which includes objectives (purposes), environment (environment), policy direction (direction), and action (action). The results show that this policy is a form of non-electoral political strategy by the Mayor of Palembang to encourage changes in ASN behavior to use public transportation as an example for the community. Its implementation is underway, but several obstacles remain, such as limited public transportation and suboptimal compliance by civil servants. This study concludes that the policy is not only a transportation solution but also a political strategy for regional heads to build leadership legitimacy.

Keywords: ***Political Strategy, ASN, Public Policy, Public Transportation***

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemilihan Perkembangan jumlah kendaraan di Kota-kota besar di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan transportasi perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, tingginya tingkat polusi udara, serta menurunnya efektivitas mobilitas masyarakat. Di sisi lain, transportasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang

membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai. Namun pada kenyataannya, pemanfaatan transportasi umum di berbagai daerah masih belum optimal karena keterbatasan akses, jangkauan pelayanan, dan rendahnya minat masyarakat dalam beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. (Ariesandi, 2020: 79-80).

Permasalahan Transportasi perkotaan mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam meningkatkan penggunaan angkutan umum. Kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai langkah administratif pemerintah, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik kepala daerah dalam mengarahkan perilaku masyarakat maupun birokrasi. Strategi politik tindakan yang dilakukan aktor politik secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan kekuasaan dan kebijakan publik (Schroder, 2010:31). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi alat strategis dalam membangun legitimasi politik dan menunjukkan komitmen kepemimpinan kepala daerah.

Upaya mengatasi persoalan transportasi perkotaan, Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 46 Tahun 2025 tentang kewajiban penggunaan angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan penggunaan transportasi publik, serta membentuk budaya penggunaan angkutan umum di lingkungan birokrasi Pemerintah Kota Palembang. ASN dijadikan kelompok sasaran utama agar mampu memberikan contoh kepada masyarakat dalam mendukung penggunaan transportasi publik.

Kebijakan kewajiban penggunaan angkutan umum bagi ASN menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya strategi politik non-elektoral yang dilakukan kepala daerah melalui kebijakan publik. Geoff Mulgan menjelaskan bahwa strategi politik merupakan serangkaian pilihan dan tindakan yang dirancang secara sadar oleh aktor publik untuk mencapai tujuan tertentu melalui pengambilan keputusan yang rasional dan terencana (Mulgan, 2020:5). Dalam penelitian ini, kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN dipahami sebagai bentuk strategi politik Wali Kota Palembang dalam membangun legitimasi kepemimpinan sekaligus mendorong perubahan perilaku birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Wali Kota Palembang dalam kebijakan kewajiban penggunaan angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 46 Tahun 2025. Penelitian ini penting dilakukan karena kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan transportasi publik, tetapi juga menunjukkan bagaimana kepala daerah menggunakan kebijakan publik sebagai instrumen strategi politik dalam membangun legitimasi kepemimpinan serta mengarahkan perilaku birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang membahas strategi politik Wali Kota Palembang dalam kebijakan kewajiban penggunaan angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini tidak hanya mengkaji kebijakan transportasi publik dari sisi implementasi, tetapi juga menganalisis kebijakan tersebut sebagai bentuk strategi politik kepala daerah dalam membangun legitimasi kepemimpinan serta mengarahkan perilaku birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif strategi politik Geoff Mulgan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik dijadikan instrumen politik dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan Teori strategi politik Geoff Mulgan. Strategi politik adalah cara yang dilakukan pemimpin dalam mencapai tujuan melalui kebijakan publik. Menurut Mulgan (2009), strategi politik tidak hanya digunakan saat pemilihan umum, tetapi juga dalam pelaksanaan pemerintahan untuk membangun legitimasi dan mengarahkan perilaku masyarakat maupun birokrasi. Dalam penelitian ini, strategi politik digunakan untuk memahami kebijakan Wali Kota Palembang yang mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi publik.

Strategi politik dikembangkan lebih lanjut menurut Geoff Mulgan melalui bukunya *The Art of Public Strategy,* membagi strategi politik menjadi empat unsur, yaitu purposes (tujuan), environment (lingkungan), direction (arah kebijakan), dan action (tindakan). Tujuan berkaitan dengan sasaran politik dan sosial yang ingin dicapai pemerintah, lingkungan berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan birokrasi yang memengaruhi kebijakan, arah kebijakan menunjukkan bentuk regulasi yang diterapkan, sedangkan tindakan merupakan implementasi nyata dari strategi tersebut. Teori tersebut untuk menganalisis strategi politik Wali Kota Palembang melalui kebijakan kewajiban penggunaan angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dipahami sebagai strategi politik non-elektoral yang bertujuan mendorong perubahan perilaku birokrasi, meningkatkan penggunaan transportasi publik, serta memperkuat legitimasi kepemimpinan pemerintah daerah (Mulgan, 2009; Schroder, 2010).

Teori Geoff Mulgan digunakan untuk menganalisis strategi politik Wali Kota Palembang dalam mewajibkan penggunaan angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai bentuk regulasi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai strategi politik dalam membangun perubahan perilaku birokrasi serta meningkatkan kesadaran penggunaan transportasi publik di Kota Palembang. Melalui teori ini, penelitian menjelaskan bagaimana strategi politik dibentuk dan dilaksanakan melalui kebijakan publik yang bertujuan mendukung penggunaan angkutan umum serta memperkuat legitimasi kepemimpinan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif Menurut Zuchri Abdussamad dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* (2021), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan strategi politik Wali Kota Palembang dalam kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara rinci proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami dinamika politik, birokrasi, dan kebijakan publik secara lebih jelas dan mendalam. "Studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mengkaji secara intensif suatu peristiwa, program, atau kebijakan dalam konteks nyata dan spesifik. (Abdussamad, 2021).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengunakan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder Data primer adalah data utama diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian atau sumber pertama. Data primer primer dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan, seperti di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta ASN sebagai kelompok sasaran kebijakan, dan bentuk pengumpulan data lainya (Nasution, 2023:6). Selain itu Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan langsung dari subjek penelitian atau sumber utama, melainkan digunakan sebagai pelengkap dan penguat data primer Data ini meliputi dokumen resmi pemerintah surat, laporan dan publikasi Pemerintah Kota Palembang, serta peraturan terkait ASN, Masyarakat dan transportasi publik. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berita media massa yang membahas kebijakan transportasi publik dan kepemimpinan kepala daerah. (Abdul Fattah Nasution, 2023:6).

Populasi dan Sampel.

Lokasi penelitian ini Ruang lingkup di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Adapun di Sekretariatan Daerah Kota Palembang, dinas Perhubungan kota Palembang, dinas Pendidikan Kota Palembang, Masyarakat Kota Palembang serta titiik transportasi umum dan Aparatur Sipil Negara ASN. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Palembang karena kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN diterapkan langsung oleh Pemerintah Kota Palembang. Menurut Sugiyono (2019), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Dengan teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian

Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap persiapan, peneliti menentukan fokus penelitian, menyusun rumusan masalah, serta menyiapkan pedoman wawancara dan kebutuhan penelitian lainnya. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak Pemerintah Kota Palembang, Dinas Perhubungan, ASN, dan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan angkutan umum. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data menggunakan teknis analisis model Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan mendalam. Dengan prosedur tersebut, penelitian dapat menjelaskan strategi politik Wali Kota Palembang dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN secara sistematis dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk strategi politik yang dilakukan oleh Wali Kota Palembang melalui kebijakan publik. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan transportasi umum, serta membentuk perubahan perilaku birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut diatur melalui Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 46 Tahun 2025 tentang kewajiban penggunaan angkutan umum bagi ASN. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kebijakan ini mendapat tanggapan yang beragam dari ASN karena masih terdapat kendala dalam fasilitas transportasi umum dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. nelitian dianalisis menggunakan teori strategi politik Geoff Mulgan yang terdiri dari purposes (tujuan), environment (lingkungan), direction (arah kebijakan), dan action (tindakan). Melalui teori tersebut, penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi politik Wali Kota Palembang dibentuk dan dilaksanakan melalui kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN. Kebijakan ini tidak hanya menjadi bentuk regulasi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi strategi politik dalam membangun legitimasi kepemimpinan serta meningkatkan kesadaran ASN terhadap penggunaan transportasi publik.

A. Terbentuknya Strategi Politik Wali Kota Palembang Dalam Mewajibkan Penggunaan Angkutan Umum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Awal Terbentuknya strategi politik Wali Kota Palembang dalam kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN dilatarbelakangi oleh kondisi kemacetan yang semakin meningkat di Kota Palembang akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah Kota Palembang kemudian menerapkan kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya serta mendukung penggunaan transportasi publik. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan membangun citra pemerintah daerah yang peduli terhadap pelayanan publik dan transportasi kota. Dalam penelitian ini, terbentuknya strategi politik dianalisis melalui indikator purposes dan environment yang terdapat dalam teori Geoff Mulgan.

Dalam penelitian ini, terbentuknya strategi politik dianalisis menggunakan indikator purposes dan environment dalam teori strategi politik Geoff Mulgan. Strategi politik dipahami sebagai serangkaian pilihan dan tindakan yang dirancang secara sadar oleh aktor publik untuk mencapai tujuan tertentu melalui kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN dipahami sebagai bentuk strategi politik Wali Kota Palembang dalam membangun legitimasi kepemimpinan serta mengarahkan perilaku birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

1. Purposes (Tujuan Strategi Politik)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama strategi politik Wali Kota Palembang dalam kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan penggunaan transportasi umum di Kota Palembang. Pemerintah daerah berharap ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transportasi publik. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan membentuk disiplin birokrasi dan mendukung program pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah menilai bahwa ASN sebagai bagian dari aparatur pemerintah harus mendukung kebijakan yang telah dibuat dan memberikan contoh positif kepada masyarakat dalam penggunaan transportasi umum.

Tujuan lain dari kebijakan ini adalah mendorong perubahan perilaku birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. ASN diharapkan mampu mendukung program pemerintah daerah melalui penggunaan angkutan umum sebagai bagian dari pelayanan publik dan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Palembang juga berupaya meningkatkan penggunaan transportasi publik melalui keterlibatan ASN sebagai kelompok sasaran utama dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian, strategi politik yang dilakukan Wali Kota Palembang tidak hanya berfokus pada persoalan transportasi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan budaya penggunaan transportasi umum di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah.

2. Environment (Lingkungan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan dalam strategi politik ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, birokrasi, dan transportasi di Kota Palembang. Tingginya jumlah kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab meningkatnya kemacetan di beberapa wilayah Kota Palembang. Selain itu, kondisi lingkungan birokrasi juga memengaruhi terbentuknya kebijakan karena ASN menjadi kelompok utama yang diwajibkan menggunakan angkutan umum. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala lingkungan seperti keterbatasan armada transportasi umum, kenyamanan angkutan umum yang belum optimal, dan kurangnya kesiapan sebagian ASN dalam mengikuti kebijakan tersebut. Kondisi tersebut menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan strategi politik melalui kebijakan penggunaan angkutan umum

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala lingkungan seperti keterbatasan armada transportasi umum, kenyamanan angkutan umum yang belum optimal, serta kurangnya kesiapan sebagian ASN dalam mengikuti kebijakan tersebut. Kondisi transportasi umum di Kota Palembang juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi politik karena belum semua wilayah memiliki akses transportasi umum yang memadai. Selain itu, masih terdapat ASN yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dinilai lebih praktis dan efisien dibandingkan menggunakan angkutan umum

B. Pelaksanaan Strategi Politik Wali Kota Palembang Dalam Menerapkan Kewajiban Penggunaan Angkutan Umum Bagi Aparatur Sipil Negara

Pelaksanaan strategi politik Wali Kota Palembang dilakukan melalui penerapan Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 46 Tahun 2025 tentang kewajiban penggunaan angkutan umum bagi ASN. Pemerintah Kota Palembang melakukan sosialisasi kepada ASN terkait tujuan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan agar kebijakan penggunaan angkutan umum dapat diterapkan dengan baik di lingkungan pemerintahan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan strategi politik dianalisis melalui indikator direction dan action dalam teori Geoff Mulgan. Strategi politik dilaksanakan melalui kebijakan publik yang diarahkan untuk mendukung penggunaan transportasi umum serta membentuk perubahan perilaku birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang

1. Direction (Arah Kebijakan)

   Arah kebijakan dalam strategi politik Wali Kota Palembang ditunjukkan melalui penerapan aturan penggunaan angkutan umum bagi ASN sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penggunaan transportasi publik. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di lingkungan birokrasi serta meningkatkan kesadaran ASN terhadap pentingnya penggunaan angkutan umum. Selain itu, arah kebijakan tersebut juga menjadi langkah pemerintah daerah dalam membangun perubahan sosial melalui kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah berupaya menjadikan kebijakan ini sebagai contoh bagi masyarakat dalam mendukung penggunaan transportasi umum di Kota Palembang.

   Selain itu, arah kebijakan tersebut juga menjadi langkah pemerintah daerah dalam membangun perubahan sosial melalui kebijakan publik. Pemerintah daerah berharap ASN mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung penggunaan transportasi umum di Kota Palembang. Kebijakan ini juga menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya disiplin birokrasi serta meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik kepala daerah dalam membangun legitimasi kepemimpinan melalui kebijakan publik.

2. Action (Tindakan)

Tindakan dalam strategi politik diwujudkan melalui pelaksanaan langsung kebijakan penggunaan angkutan umum bagi ASN. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penerapan aturan kepada ASN agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, beberapa ASN telah menggunakan angkutan umum sesuai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas transportasi umum, kurangnya kenyamanan angkutan umum, serta belum optimalnya tingkat kepatuhan ASN terhadap kebijakan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi politik dalam mendukung penggunaan transportasi publik dan menciptakan perubahan perilaku.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas transportasi umum, kurangnya kenyamanan angkutan umum, serta belum optimalnya tingkat kepatuhan ASN terhadap kebijakan tersebut. Beberapa ASN masih mengalami kesulitan dalam penggunaan transportasi umum karena keterbatasan akses dan armada angkutan umum di beberapa wilayah Kota Palembang. Selain itu, tingkat kenyamanan transportasi umum yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi politik dalam mendukung penggunaan transportasi publik dan menciptakan perubahan perilaku birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam skrpisi ini berjudul, strategi politik Wali Kota Palembang dalam kebijakan kewajiban penggunaan angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan melalui penerapan Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 46 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan transportasi publik, serta membentuk perubahan perilaku birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Strategi politik tersebut dianalisis menggunakan teori Geoff Mulgan yang terdiri dari purposes (tujuan), environment (lingkungan), direction (arah kebijakan), dan action (tindakan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan ini adalah menciptakan disiplin ASN dan meningkatkan kesadaran penggunaan angkutan umum, sedangkan lingkungan kebijakan dipengaruhi oleh kondisi kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di Kota Palembang.

Pelaksanaan strategi politik dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, dan penerapan aturan penggunaan angkutan umum bagi ASN. Arah kebijakan pemerintah daerah ditunjukkan melalui dukungan terhadap penggunaan transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik dan perubahan sosial di lingkungan birokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas transportasi umum, tingkat kenyamanan angkutan umum, dan belum optimalnya kepatuhan ASN terhadap kebijakan tersebut kebijakan menunjukkan bahwa strategi politik kepala daerah tidak hanya dilakukan dalam konteks politik elektoral, tetapi juga melalui kebijakan publik yang bertujuan membangun perubahan sosial dan meningkatkan legitimasi pemerintah daerah.

REFERENSI

Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press.

Ariesandi. 2020. Transportasi Perkotaan dan Permasalahannya. Jakarta: Rajawali Pers.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, dan Saldana, Johnny. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: SAGE Publications.

Mulgan, Geoff. 2009. The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good. Oxford: Oxford University Press.

Nasution, Abdul Fattah. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Harfa Creative.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Schroder, Peter. 2010. Strategi Politik. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.